

# **RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) TAHUN 2022**

## **SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMEINTAH (SPIP)**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
(BPBD)  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
A. Latar Belakang.....	2
B. Dasar Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Ruang Lingkup.....	3
<b>BAB II PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN ....</b>	<b>5</b>
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini .....	5
B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian .....	5
<b>BAB III PENGENDALIAN .....</b>	<b>7</b>
A. Penetapan Konteks/Tujuan.....	7
B. Hasil Identifikasi Risiko .....	9
C. Hasil Analisis Risiko .....	16
D. Pengendalian Terpasang .....	16
E. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan.....	17
<b>BAB IV RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....</b>	<b>25</b>
<b>BAB V RANCANGAN PEMANTAUAN.....</b>	<b>27</b>
<b>BAB VI Penutup .....</b>	<b>34</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU nomor 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan negara/daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU nomor 1 tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

#### **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 28 Tahun 2011 tentang SPIP Kabupaten Pasaman Barat;
4. Instruksi Bupati Pasaman Barat Nomor 700/515/Inspekt-2022 tentang Tindak Lanjut Bimbingan Teknis Peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Kabupaten Pasaman Barat;
5. Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 188.4/ /BPBD/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian interen Pemerintah (SPIP) Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

#### **C. Maksud dan Tujuan**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

#### **D. Ruang Lingkup**

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Pasaman Barat. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2021.

## BAB II

### PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

#### A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diperoleh gambaran sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian**

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Kurang Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5.	Pendeklegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Kurang Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Kurang Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

#### B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian**

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisa si Penyel esaian
a	b	c	d	e	f
I	<b>Komitmen Terhadap Kompetensi</b>				
1	Belum sesuaianya standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	Penyesuaian anjab dan peta kompetensi	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Triwulan III 2021	

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
<b>II Kepemimpinan yang Kondusif</b>					
1	Kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko belum ditetapkan oleh pimpinan	Penetapan kebijakan pengelolaan risiko oleh pimpinan	Kepala Pelaksana	Triwulan IV 2021	
2	Pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan belum diterapkan	Penerapan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	Kepala Pelaksana	Triwulan IV 2021	
<b>III Pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat</b>					
1	Pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab belum memadai	Penetapan kriteria pendeklegasian wewenang dengan tepat	Kepala Pelaksana	Triwulan IV 2021	
		Pelaksanaan pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab secara tepat	Kepala Pelaksana	Triwulan IV 2021	
		Pelaksanaan evaluasi atas pekerjaan	Kepala Pelaksana	Triwulan IV 2021	
<b>IV Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM</b>					
1	Rekrutmen, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM belum memadai	Penyesuaian anjab dan peta kompetensi	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Triwulan III 2021	
2	Evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan belum memadai	Penyesuaian anjab dan peta kompetensi	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Triwulan III 2021	
3	Anggaran pada instansi belum memadai untuk pengembangan SDM	Pengusulan anggaran	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Triwulan III 2021	

### **BAB III**

### **PENGENDALIAN**

#### **A. Penetapan Konteks/Tujuan**

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

**Tabel 3**  
**Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemda**

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Penilaian	: 2022
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026
Sumber Data	: RPJMD
Visi	: Mewujudkan Pasaman Barat Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera
Misi Strategis RPJMD	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif 2. Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa dan berdaya saing
<b>Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda</b>	<b>2. Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa dan berdaya saing</b>
Tujuan Strategis RPJMD	2. Mewujudkan Masyarakat Yang Agamais dan Berbudaya, Aman Tentram, dan Tangguh
<b>Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda</b>	<b>2. Mewujudkan Masyarakat Yang Agamais dan Berbudaya, Aman Tentram, dan Tangguh</b>
Sasaran RPJMD	2.3 Masyarakat yang tangguh menghadapi bencana
<b>Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda</b>	<b>2.3. Masyarakat yang tangguh menghadapi bencana</b>
IKU Sasaran RPJMD	14. Indeks Ketahanan Daerah
<b>Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda</b>	<b>14. Indeks Ketahanan Daerah</b>
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1. Program Penanggulangan Bencana
<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
Nama Dinas Terkait	BPBD
	Dinas Sosial
	Satpol PP dan Damkar

Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan : Mewujudkan Masyarakat Yang Agamais dan Berbudaya, Aman Tentram, dan Tangguh Sasaran : Masyarakat yang tangguh menghadapi bencana IKU : Indeks Ketahanan Daerah Program : Program Penanggulangan Bencana
---	---

**Tabel 4**  
**Penetapan Konteks Risiko Strategis BPBD**

Nama Pemda	: Kabupaten Pasaman Barat		
Tahun Penilaian	: 2022		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat		
OPD yang Dinilai	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Sumber Data	Renstra		
Tujuan Strategis	Mewujudkan Masyarakat Yang Agamais dan Berbudaya, Aman Tentram, dan Tangguh		
Sasaran Strategis	<b>1. Masyarakat yang tangguh menghadapi bencana</b>		
IKU Renstra OPD		<b>IKU</b>	
	1	Ratio warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
	2	Ratio warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
	3	Ratio warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
Program	Program Penanggulangan Bencana		
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	<b>Tujuan Strategis :</b> Meningkatnya upaya pencegahan, mitigasi, tanggap darurat bencana dan pemulihan pasca bencana		
	<b>Sasaran Strategis:</b> Masyarakat yang tangguh menghadapi bencana		
	<b>IKU Strategis:</b>		
	1. Ratio warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		
	2. Ratio warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
3. Ratio warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
<b>Program:</b> Program Penanggulangan Bencana			

**Tabel 5**  
**Penetapan Konteks Risiko Operasional BPBD**

Nama Pemda	: Kabupaten Pasaman Barat	
Tahun Penilaian	: 2022	
Periode yang dinilai	: 2021-2026	

Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
OPD yang Dinilai	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Sumber Data	Renja BPBD Tahun 2022		
Tujuan Strategis	Mewujudkan Masyarakat Yang Agamais dan Berbudaya, Aman Tentram, dan Tangguh		
Program Dinas dan Kegiatan Utama	Program Penanggulangan Bencana		
Keluaran/Hasil Kegiatan	1	Persentase masyarakat yang memperoleh informasi bencana	100%
	2	Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	37%
	3	Cakupan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	75%
	4	Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang telah disusun	40%
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : Program Penanggulangan Bencana Kegiatan : 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Persentase masyarakat yang memperoleh informasi bencana 2. Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 3. Cakupan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 4. Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang telah disusun		

## B. Hasil Identifikasi Risiko

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditanganani. Risiko-risiko dimaksud meliputi risiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh pihak auditor dan risiko yang teridentifikasi melalui diskusi manajemen, yaitu:

**Tabel 6**  
**Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah**

No	Tujuan/Sasaran Strategis /Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			C/ UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	D	e	F	g	H	I	j	K
	Tujuan : 2.Mewujudkan Masyarakat Yang Agamais dan Berbudaya, Aman Tentram, dan Tangguh									
	Sasaran : 2.3 Masyarakat yang tangguh menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Belum optimalnya pelayanan kegiatan SPM bidang kebencanaan		Kepala Daerah	1. Belum tersedianya sarana dan prasarana kebencanaan yang memadai 2. SDM dibidang kebencanaan yang belum memadai 3. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena anggaran yang tidak tersedia	Internal	C	1. Kesiapsiagaan bencana yang kurang memadai 2. Risiko atas bencana yang akan tinggi akibat tidak siapnya masyarakat maupun pemerintah daerah dalam menghadapi bencana	Kepala Daerah Masyarakat OPD Terkait

Tabel 7  
Identifikasi Risiko Strategis BPBD

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/ UC	Dampak		Pihak yang Terkena
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Uraian	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan : Meningkatnya Upaya Pencegahan, Mitigasi, tanggap darurat bencana dan pemulihan pasca bencana									
	Sasaran : Masyarakat yang tangguh menghadapi bencana	1. Ratio warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Rendahnya rasio warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		Kepala Pelaksana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota tidak terlaksana	Internal	C	Kurangnya informasi dan pemahaman tentang kebencanaan dimasyarakat	BPBD Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/ UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		2. Ratio warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Rendahnya rasio warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Kepala Pelaksana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana tidak terlaksana	Internal	C	Kurangnya pemahaman masyarakat sebelum bencana, saat menghadapi bencana, dan pascabencana	BPBD Masyarakat
		3. Ratio warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Rendahnya ratio warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Kepala Pelaksana	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana belum optimal	Internal	C	Evakuasi dan penyelamatan korban bencana tidak optimal	BPBD Masyarakat

Tabel 8  
Identifikasi Risiko Operasional BPBD

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/ UC	Dampak**)		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang memperoleh informasi bencana	Perencanaan	Belum optimalnya layanan informasi rawan bencana		Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Bidang, Kepala Seksi	Dokumen KRB yang belum diperbarui dan kegiatan KIE tidak optimal	Internal	C	1. Kurangnya informasi dan pemahaman tentang kebencanaan dan daerah rawan bencana dimasyarakat 2. Tidak adanya dasar valid untuk informasi rawan bencana yang bisa digunakan oleh OPD	BPBD Masyarakat
			Perencanaan	Budaya sadar bencana pada masyarakat sangat rendah		Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Bidang, Kepala Seksi	Kurangnya informasi dan pemahaman tentang kebencanaan dimasyarakat	Internal	C	Kurangnya pemahaman masyarakat pada pra bencana, saat bencana dan pascabencana	BPBD Masyarakat OPD Terkait

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/ UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Perencanaan	Belum berdasarkan skala prioritas dalam penanggulangan pascabencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi		Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Bidang, Kepala Seksi	Penanggulangan pascabencana masih mungutama kan kepentingan	Eksternal	UC	Risiko bencana tidak terminimalisir	BPBD Masyarakat
			Perencanaan	Kurangnya pemahaman masyarakat sebelum bencana, saat menghadapi		Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Bidang, Kepala Seksi	Kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tidak terlaksana	Eksternal	C	Kurangnya kesiapan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana	BPBD Masyarakat

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/ UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	B	C	d	e	f	G	H	I	j	k	l
				api bencana, dan pascabencana							
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Pelayanan atas penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum optimal		Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Bidang, Kepala Seksi	1. Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung 2. Tidak adanya pengembangan kapasitas teknis dan manajerial TRC	Internal	C	Tidak maksimalnya kerja petugas dalam penyelamatan dan evakuasi korban	BPBD Masyarakat

### C. Hasil Analisis Risiko

Berdasarkan identifikasi risiko, maka ditetapkan hasil analisis risiko sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Hasil Analisis Risiko**

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a	b	c	d	E	f=dxe
I	<b>Risiko Strategis</b>				
1	Belum optimalnya pelayanan kegiatan SPM bidang kebencanaan		4	3	12
II	<b>Risiko Strategis OPD 1: BPBD</b>				
1	Rendahnya rasio warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		3	3	9
2	Rendahnya rasio warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		3	3	9
3	Rendahnya ratio warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		3	3	9
II	<b>Risiko Operasional OPD 1: BPBD</b>				
I					
1	Belum optimalnya layanan informasi rawan bencana		3	3	9
2	Budaya sadar bencana pada masyarakat sangat rendah		4	4	16
3	Belum berdasarkan skala prioritas dalam penanggulangan pascabencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi		4	4	16
4	Kurangnya pemahaman masyarakat sebelum bencana, saat menghadapi bencana, dan pascabencana		3	3	9
5	Pelayanan atas penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum optimal		3	3	9

### D. Pengendalian Terpasang

Sampai dengan saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya

kurang/ tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan.

Pengendalian yang telah terpasang, antara lain adalah:

1. Memasukkan kegiatan SPM kedalam dokumen perencanaan
2. Mengajukan permintaan anggaran untuk penyusunan KRB dan KIE
3. Mengajukan permintaan anggaran untuk kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan
4. Mengoptimalkan penggunaan media sosial, surat edaran dan himbauan
5. Kerjasama dengan DPMN terkait kegiatan kebencanaan yang bisa menggunakan dana nagari
6. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi dan pembentukan KSB nagari
7. Melaksanakan survei lokasi yang terdampak bencana dan melakukan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
8. Mengajukan proposal bantuan peralatan ke BNPB.

#### **E. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan**

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Sebagian kegiatan pengendalian yang dibangun didasarkan kepada rekomendasi pihak auditor. Kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun untuk tujuan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan BNPB, BPBD Provinsi dan dinas terkait
2. Meningkatkan koordinasi dengan Kepala Daerah, BPBD Provinsi, dan BPBD Kabupaten yang telah melakukan penyusunan atas KRB
3. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait
4. Penyusunan proposal dan koordinasi dipercepat
5. Membuat Perda mengenai kegiatan kebencanaan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah nagari sebagai pedoman pemerintah nagari dalam menggunakan anggaran
6. Mengajukan usulan penanggulangan pascabencana pada usulan langsung (Aspirasi) melalui pemerintah nagari.

Tabel 10  
Daftar Risiko Prioritas

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
A	B	c	d	e	f	G
I	<b>Risiko Strategis</b>					
1	Belum optimalnya pelayanan kegiatan SPM bidang kebencanaan		12	Kepala Daerah	1. Belum tersedianya sarana dan prasarana kebencanaan yang memadai 2. SDM dibidang kebencanaan yang belum memadai 3. Kegiatan yang tidak terlaksana	1. Kesiapsiagaan bencana yang kurang memadai 2. Risiko atas bencana yang akan tinggi akibat tidak siapnya masyarakat maupun pemerintah daerah dalam menghadapi bencana
II	<b>Risiko Strategis OPD BPBD</b>					
1	Rendahnya rasio warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		9	Kepala Pelaksana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota tidak optimal	Kurangnya informasi dan pemahaman tentang kebencanaan dimasyarakat
2	Rendahnya rasio warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		9	Kepala Pelaksana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana tidak terlaksana	Kurangnya pemahaman masyarakat sebelum bencana, saat menghadapi bencana, dan pascabencana

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
A	B	c	d	e	f	G
3	Rendahnya ratio warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		9	Kepala Pelaksana	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana belum optimal	Evakuasi dan penyelamatan korban bencana tidak optimal
III	<b>Risiko Operasional OPD BPBD</b>					
1	Belum optimalnya layanan informasi rawan bencana		9	Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Bidang, Kepala Seksi	Dokumen KRB yang belum diperbaharui dan kegiatan KIE tidak optimal	1. Kurangnya informasi dan pemahaman tentang kebencanaan dan daerah rawan bencana dimasyarakat 2. Tidak adanya dasar valid untuk informasi rawan bencana yang bisa digunakan oleh OPD
2	Budaya sadar bencana pada masyarakat sangat rendah		16	Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Bidang, Kepala Seksi	Kurangnya informasi dan pemahaman tentang kebencanaan dimasyarakat	Kurangnya pemahaman masyarakat pada pra bencana, saat bencana dan pascabencana
3	Belum berdasarkan skala prioritas dalam penanggulangan pascabencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi		16	Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Bidang, Kepala Seksi	Penanggulangan pascabencana masih mungutamakan kepentingan	Risiko bencana tidak terminimalisir

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
A	B	c	d	e	f	G
4	Kurangnya pemahaman masyarakat sebelum bencana, saat menghadapi bencana, dan pascabencana		9	Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Bidang, Kepala Seksi	Kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tidak terlaksana	Kurangnya kesiapan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana
5	Pelayanan atas penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum optimal		9	Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Bidang, Kepala Seksi	1. Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung 2. Tidak adanya pengembangan kapasitas teknis dan manajerial TRC	Tidak maksimalnya kerja petugas dalam penyelamatan dan evakuasi korban

Tabel 11  
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
A	b	c	d	E	F	G	h
I	Risiko Strategis						

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
A	b	c	d	E	F	G	h
1	Belum optimalnya pelayanan kegiatan SPM bidang kebencanaan		Memasukkan kegiatan SPM kedalam dokumen perencanaan	1. Belum tersedianya sarana dan prasarana kebencanaan yang memadai 2. SDM dibidang kebencanaan yang belum memadai 3. Kegiatan yang tidak terlaksana 4. Tidak terealisasinya kegiatan sesuai dengan yang diperencanaan karena keterbatasan anggaran	Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan BNPB, BPBD Provinsi dan dinas terkait	Kepala Daerah	Januari-Agustus
II	<b>Risiko Strategis BPBD</b>						
1	Rendahnya rasio warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		Mengajukan permintaan anggaran untuk penyusunan KRB dan KIE	Anggaran yang diperoleh untuk penyusunan KRB tidak sesuai dengan yang dibutuhkan	Meningkatkan koordinasi dengan Kepala Daerah, BPBD Provinsi, dan BPBD Kabupaten yang telah melakukan penyusunan atas KRB	Kepala Pelaksana, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Januari-Agustus

No	Risiko Prioritas	Kod e Risik o	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
A	b	c	d	E	F	G	h
2	Rendahnya rasio warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Mengajukan permintaan anggaran untuk kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan	Anggaran yang diperoleh untuk kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan tidak mencukupi	Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait	Kepala Pelaksana, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Januari-Agustus
3	Rendahnya ratio warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Mengajukan proposal bantuan peralatan ke BNPB	Terlambatnya pengajuan proposal	Penyusunan proposal dan koordinasi dipercepat	Kepala Pelaksana, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Januari-Agustus
III	<b>Risiko Operasional BPBD</b>						
1	Belum optimalnya layanan informasi rawan bencana		1. Mengoptimalkan penggunaan media sosial, surat edaran dan himbauan 2. Kerjasama	Informasi yang disampaikan tidak maksimal tersampaikan kepada masyarakat	Membuat Perda mengenai kegiatan kebencanaan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah nagari sebagai pedoman	Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Bidang, Kepala Seksi	Januari-Agustus

No	Risiko Prioritas	Kod e Risik o	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesai an
A	b	c	d	E	F	G	h
			dengan DPMN terkait kegiatan kebencanaan yang bisa menggunakan dana nagari		pemerintah nagari dalam menggunakan anggaran		
2	Budaya sadar bencana pada masyarakat sangat rendah		Melaksanakan pelatihan, sosialisasi dan pembentukan KSB nagari	1. Belum menyeluruhnya masyarakat yang memperoleh informasi dan pengetahuan terkait kebencanaan 2. KSB baru dibentuk dan belum ada kegiatan lanjutan setelahnya	Melaksanakan kerja sama dengan OPD terkait	Kepala Pelaksana, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiaga an	Januari- Agustus
3	Belum berdasarkan skala prioritas dalam penanggulangan pascabencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi		Melaksanakan survei lokasi yang terdampak bencana dan melakukan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana	Penanggulangan pascabencana masih mungutamakan kepentingan	Mengajukan usulan penanggulangan pascabencana pada usulan langsung (Aspirasi) melalui pemerintah nagari	Kepala Pelaksana, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Januari- Agustus

No	Risiko Prioritas	Kod e Risik o	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesai an
A	b	c	d	E	F	G	h
4	Kurangnya pemahaman masyarakat sebelum bencana, saat menghadapi bencana, dan pascabencana		Mengajukan permintaan anggaran untuk kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan	Anggaran yang diperoleh untuk kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan tidak mencukupi	Melaksanakan kerja sama dengan OPD terkait	Kepala Pelaksana, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Januari-Agustus
5	Pelayanan atas penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum optimal		Mengajukan proposal bantuan peralatan ke BNPB	Terlambatnya pengajuan proposal	Penyusunan proposal dan koordinasi dipercepat	Kepala Pelaksana, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Januari-Agustus

## BAB IV

### RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

Tabel 12  
Rencana dan Realisasi Atas Pengkomunikasian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Dibangun

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasiann	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	D	e	F	g	h
1	Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan BNPB, BPBD Provinsi dan dinas terkait	koordinasi	BNPB, BPBD Provinsi	BPBD	Januari-Agustus		
2	Meningkatkan koordinasi dengan Kepala Daerah, BPBD Provinsi, dan BPBD Kabupaten yang telah melakukan penyusunan atas KRB	koordinasi	BPBD Provinsi atau Kabupaten Lain	BPBD	Januari-Agustus		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	D	e	F	g	h
3	Penyusunan proposal dan koordinasi dipercepat	Rapat koordniasi, Kaji Kebutuhan dan Penyusunan Proposal	Kabid PK	BNPB	Januari-Agustus		
4	Membuat Perda mengenai kegiatan kebencanaan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah nagari sebagai pedoman pemerintah nagari dalam menggunakan anggaran	Sosialisasi, Rapat koordinasi, penyusunan perda	Kabid PK	DPMN, Pemerintah Nagari dan BPBD	Januari-Agustus		
5	Melaksanakan kerja sama dengan OPD terkait	Rapat koordniasi	BPBD Kab. Pasaman Barat	DPMN, Pemerintah Nagari	Januari-Agustus		
6	Mengajukan usulan penanggulangan pascabencana pada usulan langsung (Aspirasi) melalui pemerintah nagari	Koordinasi	Pemerintah nagari	BPBD	Januari-Agustus		

## BAB V

### RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang dilaksanakan meliputi:

Tabel 13  
Rencana dan Realisasi Pemantauan Atas Kegiatan Pengendalian Intern Yang Dibutuhkan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	B	c	d	e	f	g
1	Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan BNPB, BPBD Provinsi dan dinas terkait	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Pelaksana BPBD	Semester 1		
2	Meningkatkan koordinasi dengan Kepala Daerah, BPBD Provinsi, dan BPBD Kabupaten yang telah melakukan penyusunan atas KRB	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Pelaksana BPBD	Semester 1		
3	Penyusunan proposal dan koordinasi dipercepat	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Pelaksana BPBD	Semester 1	Nov-21	

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	B	c	d	e	f	g
4	Membuat Perda mengenai kegiatan kebencanaan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah nagari sebagai pedoman pemerintah nagari dalam menggunakan anggaran	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Pelaksana BPBD	Semester 1		
5	Melaksanakan kerja sama dengan OPD terkait	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Pelaksana BPBD	Semester 1	Juni 2021	
6	Mengajukan usulan penanggulangan pascabencana pada usulan langsung (Aspirasi) melalui pemerintah nagari	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Pelaksana BPBD	Semester 1	Februari 2022	

Tabel 14  
Pencatatan Kejadian Risiko (Risk Event) dan Pelaksanaan RTP

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	<b>Risiko Strategis Pemda</b>									
1	Belum optimalnya pelayanan kegiatan SPM bidang kebencanaan			1. Belum tersedianya sarana dan prasarana kebencanaan yang memadai 2. SDM dibidang kebencanaan yang belum memadai 3. Kegiatan yang tidak terlaksana	1. Kesiapsiagaan bencana yang kurang memadai 2. Risiko atas bencana yang akan tinggi akibat tidak siapnya masyarakat maupun pemerintah daerah dalam menghadapi bencana		Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan BNPB, BPBD Provinsi dan dinas terkait	Januari-Agustus		

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
II	<b>Risiko Strategis BPBD</b>									
1	Rendahnya rasio warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota tidak optimal	Kurangnya informasi dan pemahaman tentang kebencanaan dimasyarakat		Meningkatkan koordinasi dengan Kepala Daerah, BPBD Provinsi, dan BPBD Kabupaten yang telah melakukan penyusunan atas KRB	Januari-Agustus		
2	Rendahnya rasio warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana tidak terlaksana	Kurangnya pemahaman masyarakat sebelum bencana, saat menghadapi bencana, dan pascabencana		Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait	Januari-Agustus	Juni 2021	

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
3	Rendahnya ratio warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana belum optimal	Evakuasi dan penyelamatan korban bencana tidak optimal		Penyusunan proposal dan koordinasi dipercepat	Januari-Agustus	Nov-21	
III	<b>Risiko Operasional BPBD</b>									
1	Belum optimalnya layanan informasi rawan bencana			Dokumen KRB yang belum diperbaharui dan kegiatan KIE tidak optimal	1. Kurangnya informasi dan pemahaman tentang kebencanaan dan daerah rawan bencana dimasyarakat 2. Tidak adanya dasar valid untuk informasi rawan bencana yang bisa digunakan oleh OPD		Membuat Perda mengenai kegiatan kebencanaan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah nagari sebagai pedoman pemerintah nagari dalam menggunakan anggaran	Januari-Agustus		

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
2	Budaya sadar bencana pada masyarakat sangat rendah			Kurangnya informasi dan pemahaman tentang kebencanaan dimasyarakat	Kurangnya pemahaman masyarakat pada pra bencana, saat bencana dan pascabencana		Melaksanakan kerja sama dengan OPD terkait	Januari-Agustus	Juni 2021	
3	Belum berdasarkan skala prioritas dalam penanggulangan pascabencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi			Penanggulangan pascabencana masih mungutamakan kepentingan	Risiko bencana tidak terminimalisir		Mengajukan usulan penanggulangan pascabencana pada usulan langsung (Aspirasi) melalui pemerintah nagari	Januari-Agustus	Februari 2022	
4	Kurangnya pemahaman masyarakat sebelum bencana, saat menghadapi bencana, dan pascabencana			Kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tidak terlaksana	Kurangnya kesiapan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana		Melaksanakan kerja sama dengan OPD terkait	Januari-Agustus	Juni 2021	

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
5	Pelayanan atas penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum optimal			1. Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung 2. Tidak adanya pengembangan kapasitas teknis dan manajerial TRC	Tidak maksimalnya kerja petugas dalam penyelamatan dan evakuasi korban		Penyusunan proposal dan koordinasi dipercepat	Januari-Agustus	Nov-21	

## **BAB VI**

### **Penutup**

Rencana Tindak Pengendalian Intern Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

 **KEPALA PELAKSANA**

**AZHAR, S.Pd**  
Pembina / IV.a  
NIP. 19680803 198802 1 00